**PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK DITINGKAT PENUNTUTAN DAN PUTUSAN
DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**

Oleh : *M.Arie Setiawan*

Pembimbing I : **Dr. Erdianto, SH.,M.Hum**

Pembimbing II : **Ledy Diana, SH., M.H**

Alamat: **Jalan Rawa Sari No.09, Pekanbaru- Riau**

Email: **m.ariesetiawan07@gmail.com**

Abstract

In law number 11 of 2012 about the Child Criminal Justice System gives a role to the community officer. Community Officer is a Community Care Counselor who works at the Correctional Office. The purpose of this thesis is to know the role of Correctional Office in the child criminal justice system at the level of prosecution and verdict in Bangkinang District Court.

This type of research can be classified with the type of *sociological juridical* research, because in this study the authors conducted directly the research on the location or place which studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in the jurisdiction of the Bangkinang District Court, while *the population* and *the sample* were the whole parties which related to the problem studied in this study. Sources of data used, *primary* data, *secondary* data and *tertiary* data, data collection techniques in this study by interview and literature study.

From the results of research that has been done by the authors can be concluded. *First*, The Child Prosecutor is not necessarily guided completely by the Community Research Report that created by the Post of Correctional Office Correctional Institution Class IIB Bangkinang. *Second*, The Judge of Child is not necessarily guided completely to the Community Research Report that created by by the Post of Correctional Office Correctional Institution Class IIB Bangkinang.

Keywords: Prosecution-Decision-Child Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai suksesor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun hubungan mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak yang berhadapan dengan hukum, wajib disidang pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat yang benar-benar memahami anak.² Untuk itu pemerintah memberikan perhatian dalam menangani perkara anak. Salah satu perhatian pemerintah atau negara dalam menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertitik tolak untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, anak memiliki peran strategis sebagaimana dinyatakan ketentuan Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan peranan kepada petugas kemasyarakatan. Petugas kemasyarakatan ialah Pembimbing Kemasyarakatan yang bekerja di Balai Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.³

Dalam menjalankan tugasnya, Balai Pemasyarakatan memiliki dasar hukum tetap yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibandingkan dengan Undang-undang sebelumnya (Undang-undang Pengadilan Anak), Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan beberapa kemajuan, diantaranya adalah batas minimum usia anak untuk dapat dipidana atau ditahan, yaitu 14 tahun, dipakainya pendekatan keadilan *restoratif* dalam penyelesaian perkara anak, adanya kualifikasi penegakan hukum dalam penanganan perkara anak, jenis pidana dan tindakan, larangan untuk mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.⁴

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1.

² Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia-Teori, Praktik dan Permasalahannya*, CV MandarMaju, Bandung, 2005, hlm. 220.

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴ <http://www.uajy.ac.id/berita/fakultas-hukum-uajy-gelar-seminar-nasional-menyongsong-berlakunya-uu-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/>, diakses, tanggal, 24 Maret 2016.

Anak harus mendapatkan perlindungan oleh individu, kelompok, organisasi sosial dan pemerintah khususnya yang paling utama oleh pembimbing kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depannya dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum terlebih lagi dalam proses penyelesaian perkara pidana anak.⁵ Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.⁶ Berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tugas pokok Pembimbing Kemasyarakatan adalah:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas kemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan

- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Di dalam tahap penuntutan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) mempunyai peran yang sangat penting untuk mengetahui kejiwaan atau mental dari seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi pada kenyataannya atau keadaan di lapangan dalam tahap penuntutan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dalam menjalankan perannya sangat kecil atau minim untuk memberikan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) kepada Penuntut Umum Anak agar dapat mempengaruhi atau meringankan dalam membuat *requisitoir* atau tuntutan, sebab dalam dua kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Bangkinang terdapat perbedaan antara laporan penelitian kemasyarakatan dan tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum Anak, tetapi ada juga satu kasus perkara anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang memiliki persamaan antara laporan penelitian kemasyarakatan dengan tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum Anak.⁷

Semua itu berbeda dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang terdapat pada Pasal 60 butir 3 dan butir 4. Berdasarkan data dan permasalahan tersebut diatas, maka menarik minat penulis untuk melaksanakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi mengenai hal tersebut dengan judul ***“Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Tingkat Penuntutan dan Putusan di Pengadilan Negeri Bangkinang.”***

⁵ Humaidi Usai, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak*, Fakultas Hukum Mataram, 2012, hlm. 1.

⁶ Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ Wawancara dengan Bapak Bayu Satriyo SH, Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Kampar, Hari Kamis, 31 Maret 2016, Bertempat Di Kantor Kejaksaan Negeri Kampar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Balai Pemasarakatan dalam tingkat penuntutan di Pengadilan Negeri Bangkinang?
2. Sejauh manakah pengaruh dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan terhadap pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Negeri Bangkinang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Balai Pemasarakatan dalam tingkat penuntutan di Pengadilan Negeri Bangkinang.
- b. Untuk mengetahui pengaruh dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan terhadap pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Negeri Bangkinang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman pengetahuan penulis dalam bidang ilmu pidana khususnya mengenai Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Tingkat Penuntutan dan Putusan di Pengadilan Negeri Bangkinang.
- b. Untuk memberikan sumber pemikiran dan bantuan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Tingkat Penuntutan dan Putusan di Pengadilan Negeri Bangkinang.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada masyarakat umumnya dan khususnya kepada instansi penegak hukum dalam hal

ini mengenai Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Tingkat Penuntutan dan Putusan di Pengadilan Negeri Bangkinang.

D. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya yang merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya yang berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

1. Teori Peranan

Balai Pemasarakatan sangat berperan dan bertanggung jawab dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan agar nantinya dapat membantu anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses penuntutan dan putusan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak. Di dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas yaitu:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 12.

di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;

- d. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*);
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*); dan
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat di pahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang di anggap oleh diri sendiri serta yang sebenarnya di lakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain disebut (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).⁹

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 19 dan 20.

2. Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak

Indonesia adalah salah satu Negara yang sedang mengalami perkembangan. Seiring dengan perkembangannya, Indonesia mulai merasakan adanya gerak atau gelombang kejahatan yang cukup terasa dan menarik perhatian.¹⁰ Kejahatan atau yang juga dikenal sebagai tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹¹

Hukum acara pidana sering disebut juga dengan hukum pidana formil. Menurut Lamintang, hukum pidana formal memuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang sifatnya abstrak itu diberlakukan secara konkret.¹² Sedangkan Soedarto mengatakan bahwa hukum pidana formal mengatur bagaimana dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana.¹³

Pasal 17 menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukan dalam kondisi darurat.¹⁴

3. Konsep Perlindungan Anak

¹⁰ Ninik Widiyanti dan Panji Anaroga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 1.

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97.

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 10.

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana IA*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 10.

¹⁴ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sitem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 73.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa dimana datang dan sebagaisumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak.¹⁵ Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 butir 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa "setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan dalam hukum dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum, kemudian didukung perlindungan anak harus diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan terdahulu.¹⁶ Perlindungan anak dapat membawa akibat hukum, karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.¹⁷ Arief Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan

anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹⁸

Hal yang terkait langsung dengan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai dengan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media atau labelisasi.¹⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²⁰
2. Tindak Pidana adalah Suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.²¹
3. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan (kumpulan makalah-makalah seminar)*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 13.

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 33.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 222.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 63.

²⁰ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²¹ Erdianto, *Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, 1 Agustus 2012, hlm. 20.

- korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.²²
4. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.²³
 5. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²⁴
 6. Hakim adalah Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.²⁵
 7. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.²⁶
 8. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.²⁷
 9. Kejaksaan Negeri adalah Lembaga Kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota.²⁸
 10. Pengadilan Negeri adalah merupakan lembaga peradilan yang di lingkungan

umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.³⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kejaksaan Negeri Kampar, Pengadilan Negeri Bangkinang, dan Pos Balai Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang Provinsi Riau. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah kota Bangkinang, karena di kota Bangkinang sering terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan Balai Pemasyarakatan yang berperan penting atas itu masih kurang maksimalnya menjalankan tugas dan kewajibannya untuk dilakukan. Sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya

²² Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²³ Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁴ Pasal 1 butir 6 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁵ Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁶ Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁷ Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁸ <https://www.kejaksaan.go.id>, diakses, tanggal, 26 Maret 2016.

²⁹ <https://www.pengadilan.go.id>, diakses, tanggal, 26 Maret 2016.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 57.

sehubungan dengan penelitian ini.³¹ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Bangkinang.
2. Hakim Anak Pengadilan Negeri Bangkinang.
3. Balai Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Bangkinang.
4. Anak yang berhadapan dengan hukum di Bangkinang.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.³² Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *purposive* adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh sipeneliti.

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti di lapangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari

berbagai studi kepustakaan serta perturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang bersumber dari buku-buku, makalah-makalah/jurnal/karya tulis dan juga hasil penelitian para pakar hukum yang berhubungan dengan permasalahan Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Tingkat Penuntutan dan Putusan

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 121.

di Pengadilan Negeri Bangkinang.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu merupakan bahan penelitian yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari observasi. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada pihak Kejaksaan Negeri Kampar, Pengadilan Negeri Bangkinang dan Pos Balai Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Bangkinang. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui membaca, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur-literatur kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Tingkat Penuntutan di Pengadilan Negeri Bangkinang

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai suksesor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang panca, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.³³

Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.³⁴

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pos Balai Pemasarakatan Bangkinang memiliki beberapa tugas pokok dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasarakatan dalam hal ini klien anak pemasarakatan. Tugas pokok dari Pos Balai Pemasarakatan diantaranya yaitu:

1. Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), untuk:
 - a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Anak

³³ Maidin Gultom, *Loc.cit.*

³⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang;
- b. Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat; dan
 - c. Bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam rangka proses Asimilasi dapat tidaknya Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani proses asimilasi atau Integrasi Sosial dengan baik.
2. Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang memperoleh Assimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
 3. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau Anak yang memperoleh Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
 4. Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas/Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
 5. Membuat Laporan dan Dokumentasi secara berkala kepada Pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.
 6. Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan

dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.

7. Menyelenggarakan Ketatausahaan Bapas.

Fungsi dari Pos Balai Pemasyarakatan Bangkinang yaitu antara lain:

- a. Melaksanakan Bimbingan Pemasyarakatan untuk Sistem Peradilan Pidana;
- b. Melaksanakan registrasi Klien Pemasyarakatan;
- c. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
- d. Mengikuti sidang peradilan anak di Pengadilan Negeri, Sidang TPP BAPAS, LAPAS dan RUTAN;
- e. Memberikan bantuan bimbingan kepada mantan narapidana, anak didik dan Klien Pemasyarakatan; dan
- f. Melaksanakan urusan tata usaha BAPAS.

Penulis juga memperoleh data tentang jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dari bagian Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangkinang. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, jumlah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Tahun 2016 berjumlah 33 kasus yang masuk di Kejaksaan Negeri Bangkinang.

Pada kasus yang pertama dan kasus yang kedua memiliki perbedaan antara LITMAS yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan yang isinya, pertama (DA) "wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara" yang kedua (DP) "penanggulangan penanganan", kemudian tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum Anak yang pertama (DA) "terdakwa dijatuhi 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara" yang kedua (DP) "terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan

perintah terdakwa tetap ditahan". Sementara 1 (satu) kasus memiliki persamaan antara LITMAS yang diberikan oleh Balai Pemasarakatan yang isinya, (SR dkk) "klien di kembalikan kepada orang tuanya", kemudian tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum Anak "para terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya".

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan Kepala Seksi Pidana Umum Bapak Herlambang Shaputro, SH banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di wilayah Kabupaten Kampar Bangkinang yang menjadi faktor penyebabnya bahwa pelaku melakukan tindak pidana antara lain:³⁵

1. Faktor Lingkungan

Pelaku melakukan tindak pidana terjadi dikarenakan faktor lingkungan. Hal ini terjadi dikarenakan lingkungan tempat tinggal sipelaku berada dalam lingkungan orang yang cenderung melakukan kejahatan seperti pencurian, penadahan dan narkotika

2. Faktor Ekonomi

Pelaku melakukan tindak pidana terjadi dikarenakan faktor ekonomi. hal ini terjadi dikarenakan oleh tuntutan ekonomi di Indonesia yang saat ini semakin tinggi, hal itu mengakibatkan kebutuhan primer dan skunder seseorang semakin tinggi dan harus terpenuhi maka dari itu seseorang melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan primer dan skundernya tersebut.

3. Faktor Pendidikan

Pelaku melakukan tindak pidana terjadi dikarenakan faktor pendidikan. hal ini dikarenakan oleh pengaruh pendidikan formal atau non-formal sipelaku yang tidak mencontohkan hal-hal yang baik,

atau memang sipelaku tidak mengenyam dunia pendidikan yang mungkin dikarenakan letak sekolah yang jauh dari lingkungan tempat tinggal.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Penuntut Umum Anak Bapak Dwiyana Indra.K, SH, LITMAS yang dibuat oleh Balai Pemasarakatan dapat sebagai bahan pertimbangan dalam membuat tuntutan akan tetapi Penuntut Umum Anak tidak serta merta berpedoman pada LITMAS yang dibuat oleh Balai Pemasarakatan karena Penuntut Umum Anak mempunyai pertimbangan sendiri dalam membuat tuntutan seperti berkelakuan baik dalam pemeriksaan, fakta-fakta dipersidangan, umur terdakwa, tulang punggung keluarga, perbuatan (peran), kerugian yang dialami korban, sudah adanya upaya perdamaian atau tidak, anak masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi (putus sekolah).³⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas terlihat dengan jelas bahwa Peranan Pos Balai pemsarakatan Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Bangkinang telah sesuai dengan yang diamatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk dapat membantu pihak Penuntut Umum Anak dalam membuat tuntutan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Sejauh Mana Pengaruh Dari Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Bangkinang

Negara sebagai organisasi sosial bertugas menyelenggarakan dan mempertahankan ketertiban di masyarakat dan melalui sistem peradilan

³⁵ Wawancara dengan *Bapak Herlambang Shaputro, SH*, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangkinang, Hari Senin, 3 April 2017, Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bangkinang.

³⁶ Wawancara dengan *Bapak Dwiyana Indra.K, SH*, Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Bangkinang, Hari Senin, 3 April 2017, Bertempat di Kejaksaan Negeri Bangkinang.

yang berkeadilan dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan manfaat yang akan dicapai tidak hanya dari satu sisi terdakwa saja tetapi juga bagi masyarakat dan negara.

Anggapan masyarakat tersebut dapat mempengaruhi kinerja hakim dalam penegakkan hukum sebagaimana yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakkan hukum di pengaruhi oleh beberapa faktor:³⁷

1. Faktor hukumannya sendiri (Undang-undang);
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada rasa manusia dalam pergaulan hidup.

Hakim dalam menjalankan tugasnya tetap melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 60 butir 1 dan butir 2 yaitu:

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.

Hakim dalam melakukan pemidanaan dan menetapkan sanksi dengan tujuan untuk menegakkan peraturan agar pelaku jera dan dalam suatu rangkaian suatu sistem. Sebagai sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana

dapat berdiri sendiri, akan tetap saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.³⁸

Ditinjau dari aspek normatif dari perspektif KUHAP dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta praktik peradilan sistematika dan isi putusan Hakim Anak tentang "pertimbangan hukum" ini berisi tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Penjabaran keterangan Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Anak dan barang bukti;
- b. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan dan tanggapan serta pertimbangan Hakim Anak terhadap tuntutan pidana dan pleidooi dari penuntut umum Anak dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; dan
- c. Pencantuman pertimbangan Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak dan Hakim mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Putusan Hakim Anak juga mempertimbangkan hal ini, yang secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 60 butir 3 dan butir 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada butir (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 115.

³⁸ Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 115.

Penulis juga memperoleh data tentang jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dari bagian Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangkinang.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan Hakim Anak Ibu Nurafriani Putri, SH yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara Anak antara lain:³⁹

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Fakta-fakta di persidangan;
- c. Pendapat orang tua/Wali;
- d. Pendapat korban/ pendapat anak korban;
- e. Faktor kepribadian korban/terdakwa; dan
- f. LITMAS yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Anak Bapak Muhammad Fadil, SH yang membuat putusan Hakim dapat berbeda antara LITMAS yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan dengan putusan hakim Anak walaupun jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Anak itu sama adalah Hakim Anak mempunyai pertimbangan sendiri dalam memutuskan suatu perkara Anak seperti:⁴⁰

- a. Fakta-fakta dipersidangan;
- b. Anak sudah pernah dipidana atau belum pernah dipidana;
- c. Anak masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi (putus sekolah);
- d. Orang tua dapat memberikan jaminan agar anaknya tidak mengulangi perbuatannya;
- e. Cara pelaku melakukannya;

- f. Peran pelaku;
- g. Faktor psikologi korban/terdakwa;
- h. Sudah ada perdamaian atau belum ada perdamaian;
- i. Korban tidak memaafkan; dan
- j. Laporan Penelitian Kemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pengaruh dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan terhadap pertimbangan putusan Hakim di Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sangat penting dan sangat berpengaruh dalam memberikan pertimbangan Hakim Anak untuk memutus perkara Anak sebab Hakim Anak dalam memutus perkara Anak berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Pos Balai Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bangkinang dalam tingkat penuntutan di Pengadilan Negeri Bangkinang telah sesuai dengan yang diamatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk dapat membantu pihak Penuntut Umum Anak dalam membuat tuntutan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi pada kenyataan dilapangan Penuntut Umum Anak tidak serta merta berpedoman penuh pada LITMAS yang dibuat oleh Pos Balai Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bangkinang karena Penuntut Umum Anak mempunyai pertimbangan sendiri dalam membuat tuntutan seperti berkelakuan baik dalam pemeriksaan, fakta-fakta di persidangan, umur terdakwa, tulang punggung keluarga, perbuatan (peran), kerugian yang dialami korban, sudah adanya upaya perdamaian atau tidak, anak masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi (putus sekolah).

³⁹ Wawancara dengan Ibu Nurafriani Putri, SH, Hakim Anak Pengadilan Negeri Bangkinang, Hari Senin, 3 April 2017, Bertempat di Pengadilan Negeri Bangkinang.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Fadil, SH, Hakim Anak Pengadilan Negeri Bangkinang, Hari Senin, 3 April 2017, Bertempat di Pengadilan Negeri Bangkinang.

2. Pengaruh dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap pertimbangan putusan Hakim di Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sangat penting dan sangat berpengaruh dalam memberikan pertimbangan Hakim Anak untuk memutus perkara Anak sebab Hakim Anak dalam memutus perkara Anak berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi pada kenyataan dilapangan Hakim Anak tidak serta merta berpedoman penuh terhadap LITMAS yang dibuat oleh Pos Balai Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Bangkinang karena Hakim Anak mempunyai pertimbangan sendiri dalam membuat putusan seperti fakta-fakta dipersidangan, anak sudah dipidana atau belum pernah dipidana, anak masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi (putus sekolah), orang tua dapat memberikan jaminan agar anaknya tidak mengulangi perbuatannya, cara pelaku melakukannya, peran pelaku, faktor psikologi korban atau pelaku, sudah ada perdamaian atau belum ada perdamaian, korban tidak memaafkan, dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan.

B. Saran

1. Peranan Pos Balai Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Bangkinang dalam tingkat penuntutan di Pengadilan Negeri Bangkinang telah sesuai dengan yang diamatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk dapat membantu pihak Penuntut Umum Anak dalam membuat tuntutan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Namun masih harus ditingkatkan lagi dalam hal sinkronisasi antara Pos Balai Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Bangkinang dengan Kejaksaan Negeri Bangkinang sebagai Penuntut Umum Anak agar

tercapainya tujuan pemidanaan terhadap Anak karena Anak itu sendiri dianggap masih mempunyai masa depan dan Anak pun masih mempunyai kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi dimasa depan.

2. Pengaruh dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap pertimbangan putusan Hakim di Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sangat penting dan sangat berpengaruh dalam memberikan pertimbangan Hakim Anak untuk memutus perkara Anak sebab Hakim Anak dalam memutus perkara Anak berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun masih harus ditingkatkan lagi dalam hal sinkronisasi antara Pos Balai Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Bangkinang dengan Pengadilan sebagai Hakim Anak agar tercapainya tujuan pemidanaan terhadap Anak karena Anak itu sendiri dianggap masih mempunyai masa depan dan Anak pun masih mempunyai kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Gosita, Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

_____, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (kumpulan makalah-makalah seminar)*, Refika Aditama, Bandung.

Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia-Teori, Praktik dan Permasalahannya*, CV Mandar Maju, Bandung.

Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Sholehudin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana IA*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Semarang.

Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Usai, Humaidi, 2012, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak*, Fakultas Hukum Mataram, Mataram.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widiyanti, Ninik dan Panji Anaroga, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Jurnal

Erdianto, 2012, "Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, No 1 Agustus.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

D. Website

<https://www.uajy.ac.id/berita/fakultas-hukum-uajy-gelar-seminar-nasional-menyongsong-beralaknya-uu-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/>, diakses, tanggal, 24 Maret 2016.

<https://www.kejaksaan.go.id>, diakses, tanggal, 26 Maret 2016.

<https://www.pengadilan.go.id>, diakses, tanggal, 26 Maret 2016.